

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 membawa perubahan fundamental dalam tatanan geopolitik global. Kekuatan-kekuatan kolonial Eropa yang mengalami kemunduran secara signifikan, membuka jalan bagi gelombang dekolonisasi yang masif di Asia dan Afrika. Banyak negara berhasil meraih kemerdekaan, termasuk Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan ini tidak serta merta membawa stabilitas, sebab dunia sedang dihadapkan pada polarisasi baru, yakni Perang Dingin. Dimana adanya dua kekuatan adidaya, Amerika (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur), muncul dengan ideologi yang saling bertentangan, menciptakan ketegangan global yang mengancam kedaulatan negara-negara yang baru merdeka (Luerdi & Faruki, 2017).

Di tengah tekanan Perang Dingin tersebut, negara-negara Asia-Afrika yang sebagian besar masih rapuh secara ekonomi dan politik merasa terjepit di antara dua kutub kekuatan besar. Persoalan ini diperparah dengan masih berlangsungnya imperialisme di berbagai wilayah, seperti Vietnam di Indo-Cina, Aljazair, Tunisia, dan Maroko, serta sengketa sisa-sisa kolonialisme seperti masalah Irian Barat bagi Indonesia, konflik India-Pakistan, dan pengungsian rakyat Palestina akibat pendudukan paksa oleh Israel yang didukung Blok Barat (Asmawi, 1985). Meskipun Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) telah dibentuk sebagai lembaga perdamaian dunia, dalam praktiknya lembaga ini belum mampu menyelesaikan ketegangan-ketegangan tersebut secara efektif.

Menghadapi situasi ini, Indonesia tidak memilih sikap pasif. Sebagai negara yang baru merdeka namun memiliki kesadaran geopolitik yang kuat, Indonesia mengadopsi politik luar negeri "Bebas Aktif" yang digagas oleh Mohammad Hatta, sistem politik ini menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak blok manapun, namun secara aktif berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan menentang segala bentuk penjajahan (Kusumaatmadja, 1983). Komitmen ini kemudian mendorong Indonesia untuk tampil sebagai salah satu penggerak solidaritas Asia-Afrika, yang salah satu perwujudan konkretnya adalah keikutsertaan dalam Konferensi Kolombo pada April-Mei 1954, bersama India, Pakistan, Burma, dan Ceylon. Dari konferensi itulah muncul gagasan untuk menyelenggarakan pertemuan yang lebih luas, dan Indonesia ditunjuk untuk menjajaki kemungkinan pelaksanaannya (ANRI, 2012).

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Indonesia kemudian menjadi tuan rumah Konferensi Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 Desember 1954 di Istana Bogor. Konferensi ini juga dikenal dengan Konferensi Panca Negara, mengingat pertemuan tersebut dihadiri oleh para perdana menteri dari kelima negara pemrakarsa Konferensi Asia Afrika (Dermawan, 2004). Konferensi ini bukan sekadar pertemuan pendahuluan, melainkan fondasi diplomatik yang menentukan arah, agenda, dan

mekanisme penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Di sinilah letak signifikansi Istana Bogor yang melampaui fungsinya sebagai sebuah lokasi semata sebagai bekas pusat kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pemilihan Istana Bogor sebagai tempat pertemuan para pemimpin negara-negara merdeka memiliki makna simbolis yang kuat.

Pemilihan Istana Bogor sebagai lokasi penyelenggaraan Konferensi Bogor 1954 bukanlah keputusan yang bersifat teknis atau kebetulan. Istana Bogor memiliki sejarah panjang sebagai bekas kediaman dan pusat kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda selama lebih dari dua abad. Istana ini adalah simbol kuat dari dominasi kolonial, eksploitasi, dan ketidaksetaraan yang dialami bangsa terjajah di bawah sistem kolonialisme Eropa. Penyelenggaraan pertemuan para pemimpin negara merdeka di tempat bersejarah ini menegaskan kedaulatan yang telah direbut kembali dan transisi kekuasaan dari tangan penjajah ke tangan bangsa Asia-Afrika sendiri.

Transisi makna ruang ini semakin nyata ketika para pemimpin negara-negara merdeka Asia dan Afrika yakni India, Pakistan, Burma, Ceylon, dan Indonesia berkumpul di tempat yang sama untuk merumuskan agenda solidaritas antarbangsa, terjadilah sebuah pembalikan simbolis yang bermakna. Ruang yang dahulu menjadi simbol kekuasaan penjajah kini bertransformasi menjadi panggung diplomasi bangsa-bangsa yang baru merebut kembali kedaulatannya. Pemilihan tempat ini secara tidak langsung

menyampaikan pesan politik yang tegas: era kolonialisme telah berakhir, dan bangsa-bangsa Asia-Afrika kini hadir sebagai aktor yang setara dalam percaturan politik internasional.

Dimensi simbolis ini menjadi semakin penting apabila ditempatkan dalam konteks Perang Dingin. Di tengah tekanan dua blok kekuatan besar yang berloma memperluas pengaruh ideologisnya, penyelenggaraan konferensi di Istana Bogor menegaskan tiap negara-negara Asia-Afrika untuk tidak sekadar menjadi objek persaingan geopolitik, melainkan subjek yang mampu menentukan arah politik globalnya sendiri. Dengan kata lain, Istana Bogor bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga media pernyataan kedaulatan yang berbicara melalui simbol dan ruang.

Dalam kajian sejarah diplomatik, ruang atau tempat penyelenggaraan sebuah pertemuan tidak jarang memiliki peran yang melampaui fungsi fisiknya. Pemilihan lokasi dapat mencerminkan orientasi politik, menyampaikan pesan kepada dunia internasional, bahkan membentuk dinamika dan hasil dari pertemuan itu sendiri. Istana Bogor dalam konteks Konferensi Bogor 1954 adalah contoh konkret dari fenomena ini, di mana ruang dan sejarahnya menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi diplomatik yang sedang dibangun oleh bangsa-bangsa Asia-Afrika pada masa itu.

Kajian mengenai Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 dan dinamika diplomasi Asia-Afrika pada masa Perang Dingin sesungguhnya telah banyak mendapat perhatian dari para sejarawan. Sebagian besar penelitian

yang ada cenderung memusatkan perhatian pada hasil-hasil KAA di Bandung, seperti lahirnya Dasasila Bandung dan dampaknya terhadap pembentukan Gerakan Non-Blok (Sadewa & Hakiki, 2023).

Penelitian yang secara spesifik mengenai Konferensi Bogor 1954 masih sangat terbatas. Konferensi ini lebih sering disebutkan sebagai bagian dari pendahuluan dalam narasi yang lebih besar tentang Konferensi Asia-Afrika (KAA) Bandung, bukan sebagai peristiwa historis yang berdiri sendiri yang dikaji secara mendalam. Akibatnya, proses perencanaan, dinamika diplomatik, dan keputusan-keputusan krusial yang dihasilkan dalam konferensi tersebut belum mendapat perhatian historiografis yang cukup.

Salah satu penelitian yang secara khusus mengangkat Konferensi Bogor 1954 sebagai objek kajian adalah skripsi (Fatimah, 2025) yang berjudul *"Konferensi Bogor sebagai Cikal Bakal Konferensi Asia-Afrika dalam Pemberitaan Koran Kedaulatan Rakjat (1954-1955)."* Penelitian tersebut mengkaji Konferensi Bogor melalui pendekatan sejarah pers, dengan menjadikan arsip koran Kedaulatan Rakjat edisi 1954–1955 sebagai sumber primer untuk melihat bagaimana media massa nasional membingkai peristiwa tersebut dan membentuk opini publik pascakolonial. Meskipun menggunakan metode sejarah yang sama dengan penelitian ini, fokus kajian tersebut tertuju pada wacana dan opini publik yang terbentuk melalui media, sehingga Istana Bogor sebagai tempat berlangsungnya konferensi hanya hadir sebagai latar peristiwa, tanpa dikaji lebih jauh

sebagai ruang yang mengalami transformasi makna.

Lebih jauh lagi, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji peran dan makna Istana Bogor sebagai ruang penyelenggaraan konferensi tersebut. Kajian tentang sejarah Istana Bogor yang ada umumnya bersifat deskriptif-arkeologis, membahas arsitektur, koleksi benda seni, atau fungsi istana sebagai tempat kediaman resmi presiden, tanpa mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa diplomatik penting yang pernah berlangsung di dalamnya. Padahal, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Istana Bogor menyimpan dimensi simbolis yang sangat relevan untuk memahami bagaimana bangsa-bangsa Asia-Afrika membangun identitas dan kedaulatannya pada era pasca-kolonial.

Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Dengan menjadikan Konferensi Bogor 1954 dan peran Istana Bogor sebagai fokus utama kajian, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif baru dalam historiografi diplomasi Asia-Afrika, yakni bagaimana ruang dan simbolisme tempat turut membentuk narasi dan makna dari sebuah peristiwa diplomatik. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan dalam sejarah diplomatik kontemporer yang semakin memberikan perhatian pada dimensi budaya, simbolik, dan spasial dari praktik diplomasi, tidak hanya pada hasil dan keputusan politiknya semata.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan membahas "*Dari Simbol Kolonial ke Panggung Diplomasi Asia-Afrika: Istana Bogor dalam Konferensi Bogor 1954*". Fokus utama studi ini adalah menganalisis secara

mendalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan konferensi tersebut, dengan penekanan khusus pada bagaimana Istana Bogor difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya historiografi Konferensi Bogor, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang peran ruang dalam diplomasi tingkat tinggi.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini memiliki pembatasan masalah yang dibagi menjadi batas spasial (ruang) dan batas temporal (waktu). Batas spasial yang ditetapkan oleh penulis adalah Istana Bogor itu sendiri. Fokus penelitian akan terbatas pada penggunaan berbagai ruang dan fasilitas yang ada di dalam kompleks Istana Bogor. Kemudian batas temporal yang ditetapkan oleh penulis adalah periode waktu sebelum, selama, dan segera setelah Konferensi Bogor tahun 1954.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Istana Bogor dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Bogor tahun 1954?
2. Bagaimana penggunaan ruang dan fasilitas di Istana Bogor mendukung pelaksanaan Konferensi Bogor tahun 1954?
3. Apa signifikansi penggunaan Istana Bogor sebagai lokasi Konferensi Bogor tahun 1954 terhadap jalannya konferensi dan citra Indonesia di kancah internasional.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis alasan dibalik pemilihan Istana Bogor sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Bogor tahun 1954.
2. Mendeskripsikan penggunaan ruang dan fasilitas di Istana Bogor selama pelaksanaan Konferensi Bogor tahun 1954.
3. Menganalisis signifikansi penggunaan Istana Bogor sebagai lokasi Konferensi Bogor tahun 1954 terhadap jalannya konferensi dan citra Indonesia di kancah internasional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah diplomasi Indonesia, studi tentang pemanfaatan bangunan bersejarah diplomasi Indonesia, serta studi tentang pemanfaatan bangunan bersejarah dalam konteks politik dan sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat umum, pemerintah, dan pihak-pihak terkait mengenai peran penting Istana Bogor dalam sejarah diplomasi Indonesia. Hasil penelitian ini juga

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemanfaatan bangunan-bangunan bersejarah lainnya untuk kegiatan-kegiatan strategis negara.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah terdiri dari lima tahap, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018).

1. Pemilihan Topik

Tahap pertama adalah pemilihan topik. Penulis memilih topik penelitian didasari dengan dua alasan, yakni adanya kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dalam hal ini, kedekatan emosional muncul dari kebanggaan terhadap peran Indonesia sebagai tuan rumah peristiwa penting yang membentuk tatanan dunia pasca-kolonial. Sementara itu, kedekatan intelektual didorong oleh keinginan untuk mengisi kekosongan penelitian mengenai aspek "penyelenggaraan" diplomasi tingkat tinggi, yakni bagaimana logistik, manajemen, dan protokol sebuah konferensi besar dapat memengaruhi hasil politiknya.

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pada tahap heuristik, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu mengenai keadaan politik dunia pasca Perang Dunia II,

Konferensi Bogor, dan mengenai Istana Bogor sebagai tempat penyelenggaraan konferensi. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui studi pustaka hingga wawancara dengan tokoh ahli dalam topik tersebut. Kemudian sumber sejarah tersebut diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang didapatkan dari tangan pertama, yang ditulis atau disaksikan secara langsung oleh orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari masa setelah terjadinya peristiwa sejarah.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis oleh penulis dengan cara kritik sumber. Kritik tersebut dilakukan pada tahap hasil penelitian yang digunakan untuk menguji keabsahan data dan sumber. Agar diperoleh data dan sumber yang valid, maka dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kritik intern dan ekstern yang berkaitan dengan kredibilitas sumber (Sjamsuddin, 2007).

Kritik intern bertujuan memastikan kebenaran isi yang digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kritik ekstern berfokus pada pemeriksaan keaslian fisik sumber. Kedua jenis kritik ini dilakukan untuk menjaga keaslian dan kredibilitas sumber, sehingga hasil interpretasi nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

4. Interpretasi

Setelah melewati tahap verifikasi atau kritik sumber, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Tahap ini merupakan proses penafsiran fakta-fakta sejarah serta penyusunan yang menyangkut seleksi sejarah. Dalam proses penafsiran, hanya fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan tema penelitian karena tidak semua fakta sejarah bisa dimasukkan. Penulis harus memilih setiap fakta yang paling relevan dengan topik yang ditulis atau teliti untuk memastikan kebenarannya. Penafsiran fakta ini harus logis dalam konteks keseluruhan peristiwa, sehingga berbagai fakta tersebut dapat disusun dan dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. Historiografi

Kemudian tahap terakhir ialah historiografi atau penulisan sejarah. Dalam hal ini, historiografi diartikan sebagai sebuah penulisan rekonstruksi yang terkait dengan peristiwa di masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang telah didapatkan (Muara Padiatra, 2020).

F. Bahan Sumber

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penulis menggunakan surat kabar yang terdapat Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan surat kabar dan majalah Belanda yang terbit sekitar tahun terjadinya

peristiwa tersebut yang dapat diakses di *website*.

Sumber primer berupa buku *Konperensi Bogor* yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI yang menyajikan sebuah dokumentasi berharga mengenai pertemuan penting para perdana menteri dari lima negara pada tahun 1954 di Istana Bogor. Sebagai catatan resmi, buku ini secara cermat menghadirkan intisari pidato-pidato kunci yang disampaikan oleh para pemimpin seperti Jawaharlal Nehru, Ali Sastroamidjojo, Mohammed Ali, Sir John Kotelawala dan U Nu. Melalui transkrip pidato-pidato tersebut, pembaca dapat menyelami semangat negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka untuk menentang kolonialisme, menyerukan perdamaian dunia di tengah panasnya Perang Dingin, dan membangun kerja sama lintas benua. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan biodata singkat masing-masing perdana menteri.

Buku *Istana-Istana Kepresidenan di Indonesia* yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia memuat uraian komprehensif mengenai sejarah dan fungsi Istana Bogor secara kronologis. Perkembangannya dari yang sekadar tempat peristirahatan kolonial hingga menjadi ruang diplomasi kenegaraan, sehingga dapat memperkuat argumen penelitian terkait kelayakan dan signifikansi pemilihan Istana Bogor sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi tersebut.

Buku *The Bandung Connection: Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955* karya Roeslan Abdulgani menawarkan perspektif penting mengenai Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955. Sebagai

Sekretaris Jenderal KAA, Abdulgani tidak hanya menyajikan fakta sejarah, tetapi juga memberikan wawasan langsung sebagai pelaku peristiwa. Buku ini menjelaskan latar belakang KAA, yaitu situasi global pasca Perang Dunia II dan semangat dekolonisasi. Penulis merinci persiapan hingga pelaksanaan konferensi, termasuk tantangan diplomatik dan proses mencapai kesepakatan di antara negara-negara peserta.

